

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan bukanlah proses yang dingin dan menakutkan dengan mengorbankan darah, keringat serta air mata. Pembangunan adalah sesuatu yang “bersahabat”. Pembangunan, seharusnya merupakan proses yang memfasilitasi manusi mengembangkan hidup sesuai dengan pilihannya sendiri. Bila manusia mampu mengoptimalkan potensinya, maka akan bisa maksimal pula kontribusinya untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kemakmuran sebuah bangsa dicapai berbasiskan kekuatan rakyat yang berdaya dan menghidupinya. Penyebab dari langgengnya kemiskinan, ketidakberdayaan, maupun keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Diakibatkan keterbatasan akses, manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya. Akibatnya, manusia hanya menjalankan apa yang terpaksa dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya bisa dilakukan).

Tujuan pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan bersama, maka cara untuk mencapainya pun seharusnya melalui upaya-upaya pencapaian kesejahteraan bersama, dan konsisten dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, pembangunan berarti merangsang suatu masyarakat sehingga gerak majunya berakar dari dinamika sendiri dan dapat bergerak atas kekuatan sendiri. Tidak ada model pembangunan yang berlaku universal. Dalam jangka panjang, suatu pembangunan tak akan berhasil dan bertahan, jika pembangunan tersebut bertentangan dengan

nilai-nilai dasar yang dianut masyarakat. Karena itu setiap pemberdayaan, harus selalu mengedepankan pada pengembangan potensi manusia.

Setiap potensi manusia dalam mengembangkan hidupnya akan menjadi optimal jika setiap potensi tersebut diberdayakan secara maksimal. Pemberdayaan yang memfokuskan diri pada kesejahteraan rakyat, tentunya harus melalui jalan dari pembangkitan kekuatan rakyat itu sendiri. Produksi juga merupakan bagian penting dalam pendekatan ini, namun bukan tujuan utama. Tujuan utama, merupakan hal strategis yang tidak netral dan bebas nilai, sebab akan mempengaruhi paradigma berpikir, metodologi dan pengorganisasian pencapaian tujuan. Pendekatan pembangunan berpusat pada rakyat (*people centered development*), menekankan pertumbuhan manusia (aktualisasi potensi manusia), pemerataan, keberlanjutan (*sustainability*), dan semangat kemandirian masyarakat itu sendiri.

Dengan berbagai keterbukaan dan peluang, dimana masyarakat mempunyai kebebasan untuk memilih, maka masyarakat dapat mengembangkan berbagai potensi produktif mereka. Dengan demikian, pembangunan akan berkembang secara dinamik berdasar kekuatan masyarakat sendiri. Bila masyarakat telah tumbuh dan berdaya, maka pembangunan akan berurat berakar (*rooted*) pada rakyat, sehingga makin kuat dan kokoh menyangga bangsa ini.

Masyarakat diperlukan untuk memperkuat peran sertanya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak bersikap masa bodoh dan menghilangkan *image* bahwa urusan pembangunan merupakan urusan pemerintah semata. Padahal pembangunan akan sangat berimplikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri, apabila mereka turut terlibat didalamnya.

Seiring dengan makin tingginya kesadaran masyarakat akan arti penting lingkungan hidup, nilai-nilai budaya, humanism dan hak-hak asasi manusia, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat semakin memiliki arti tersendiri di masyarakat. Sesuai dengan namanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat umumnya bertujuan mensejahterakan masyarakat, dalam arti memberdayakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bersama. Kebutuhan tersebut bisa berarti pendidikan, tempat tinggal yang layak, keadilan, lingkungan yang alami, dan dalam skala tertentu termasuk pula persoalan gender.

Upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam memberdayakan masyarakat bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah mereka, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar, dan sebagai bentuk kemandirian dari penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui berbagai upaya untuk menjamin kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, perwujudan keadilan dan kesetaraan gender, serta percepatan pembangunan pedesaan, perkotaan, kawasan pesisir, dan kawasan tertinggal. Masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. Masalah kemiskinan juga menyangkut tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam salah satu programnya terus berusaha menekan angka kemiskinan, termasuk didalamnya mengurangi pengangguran di rumah tangga miskin. Untuk mencapai tujuan tersebut setidaknya ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan yaitu kapasitas manajemen pemerintah daerah, alokasi *resources* yang efektif dan efisien, dan output yang relevan dengan kebutuhan penanggulangan kemiskinan (Bappeda dan Puspics, 2009).

Trend menurunnya angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo dalam beberapa periode tahun belakangan ini tidak lepas dari kinerja pemerintah daerah dalam usaha mengentaskan kemiskinan. Sebesar 43,23% jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada tahun 2005 secara periode mengalami penurunan menjadi 24,97% pada tahun 2008. Hasil pendataan sosial ekonomi tahun 2008 di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa sebesar 31% atau 73.250 jumlah penduduknya merupakan rumah tangga miskin. Tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota juga cukup bervariasi. Jumlah rumah tangga miskin tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo yaitu sebesar 39,61% sedangkan angka terendah sebesar 12,95% terdapat di Kota Gorontalo (Bappeda dan Puspics, 2009).

Pembangunan dalam perekonomian membawa banyak kesempatan bagi masyarakat walaupun masih ada yang belum merasakan manfaat pembangunan dan masih bergelut dalam kemiskinan. Bahkan, ada sebagian yang bahkan bertambah miskin akibat kebijakan pembangunan. Di saat krisis ekonomi, beban hidup yang harus dipikul oleh penduduk miskin menjadi bertambah berat. Sebagian besar peningkatan beban hidup tersebut di pikul oleh penduduk miskin perempuan. Hal tersebut tidak lepas dari kenyataan bahwa sebenarnya terdapat dimensi gender dalam

permasalahan kemiskinan. Selain aspek usia, kelas sosial, etnisitas, dan agama, gender adalah faktor kunci yang menentukan dimensi kerentanan dari kemiskinan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat lebih banyak pada dukungan atas program yang dicanangkan pemerintah. Artinya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini memiliki keterikatan yang cukup dekat dengan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Setidaknya dalam soal pendanaan atau dalam skala tertentu otoritas dalam pelaksanaan di lapangan. Dalam kelompok ini yang terlihat perannya dalam memberdayakan masyarakat antara lain melalui pemberdayaan organisasi PKK dan karang taruna. Program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bersifat akomodatif terhadap pemerintah, lebih banyak bersifat kekeluargaan dan mengambil jalan musyawarah bersama dalam menyelesaikan persoalan, seperti halnya musyawarah desa dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu pada tataran implementasi, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Payunga Kecamatan Batudaa belum sepenuhnya dapat menunjukkan perannya secara maksimal dalam meningkatkan kemandirian masyarakat. Pada titik masalah inilah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki arti penting sebagai sarana penghubung, penyadar, sekaligus sebagai “alat kontrol” dalam proses pembangunan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sendiri muncul karena kesadaran akan arti penting nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab pembangunan. Bila demikian halnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memungkinkan tumbuhnya kesadaran akan nilai asasi manusia yang didudukkan sejajar dengan proses pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berusaha mempersiapkan masyarakat agar berkemampuan memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari proses pembangunan meningkatkan keswadayaan mereka sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan di desa. Selanjutnya dari berbagai pengalaman pelayanan kepada masyarakat disusun model-model pendekatan yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan pendekatan pembangunan yang sedang berjalan.

Program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah mempersiapkan masyarakat agar lebih berdaya, mau kerja keras, dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai pelaksana pembangunan yang mandiri. Bagi masyarakat yang telah berdaya dan mandiri. Program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibutuhkan sebagai pengawal, pendamping dan fasilitator. Pada masyarakat yang belum mampu memahami hakikat pembangunan, maka campur tangan yang bijaksana perlu dilakukan.

Inilah yang diharapkan dari program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan kemandirian masyarakat. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat akan lebih efektif mencapai tujuan, jika dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab, sehingga antara masyarakat dan antara pemerintah tumbuh semangat untuk bekerja sama, karena itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dituntut untuk melaksanakan tanggungjawab pemberdayaan masyarakat, karena mereka adalah orang-orang yang paling memahami potensi wilayah, permasalahan wilayah, aspirasi masyarakat, kemampuan masyarakat, dan sumber-sumber yang dimiliki masyarakat untuk mewujudkan kemandiriannya.

Kemandirian bagi masyarakat Desa Payunga adalah sebuah cita-cita yang luhur dibangun bersama masyarakat, Pemerintah, aparatnya dan berbagai program dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri telah dilakukan oleh masyarakat pada program seperti peternakan ayam dan kerajinan tangan (krawang). Namun demikian kemandirian masyarakat hanya terbentur manakala program pemberdayaan yang dijalankan pemerintah hanya mengacu pada pencapaian target semata. Tetapi tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat desa payunga. Dengan demikian maka ketika pengembangan telah selesai hilang pula program, tidak berkelanjutan (secara contiuniutas) dari program tersebut. Oleh karena itu, peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai lembaga resmi Pemerintah akan menjadi pilar utama dalam membentuk kemandirian masyarakat Desa Payunga. Sekalipun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Payunga terbentuk atas dasar PP No. 58 tahun 2005. Namun demikian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mampu menjembatani antara program-program pemerintah dalam melayani masyarakat.

Dalam kaitan ini, apakah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Payunga Kecamatan Batudaa telah mampu memberdayakan masyarakatnya? Dapatkah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berperan meningkatkan kemandirian masyarakat di Desa Payunga Kecamatan Batudaa? Secara sederhana jawaban dari permasalahan tersebut, memotivasi peneliti untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut melalui suatu penelitian yang berjudul: “Analisis Implementasi program lembaga pemberdayaan Masyarakat di Desa Payunga Kec. Batudaa Kab. Gorontalo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang dikemukakan, maka identifikasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bagaimana implelementasi program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di Desa Payunga Kecamatan Batudaa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat di Desa Payunga Kecamatan Batudaa ini mengacu pada fokus permasalahan yang dibahas yaitu sebagai berikut:

- Untuk mengetahui implementasi program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di Desa Payunga Kecamatan Batudaa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian Analisis Implementasi Program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Payunga Kec. Batudaa Kab. Gorontalo ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam mengimplementasi programnya sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dalam merespon dan memaknai keinginan dan aspirasi masyarakat.

2. Sebagai implemementasi pengembangan profesi bagi peneliti dan mengkaji secara ilmiah tentang program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Payunga Kec Batudaa Kab Gorontalo.
3. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemandiriannya melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, agar memiliki kekuatan kreatif, sehingga mampu melakukan sesuatu, memecahkan masalah, bekerja membangun keterampilan dan pengetahuan.
4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian.